



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2019

KATA PENGANTAR



Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah XIII merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, Januari 2020

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



TITO GESIT UTIARTO, S.E., DESS

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview pada tahun 2019 sebanyak 28 Indikator dari 7 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan dengan baik, hal ini menandakan capaian sasaran BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 -2019

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar isi.....	iii

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.	Latar Belakang	2
I.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	4
I.2.1	Sub Bagian Tata Usaha	5
I.2.2	Seksi Transportasi Jalan	6
I.2.3	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP	7
I.2.4	Seksi Sarana dan Prasarana SDP	7
I.2.5	Kelompok Jabatan Fungsional	8
I.3.	Sumber Daya Manusia	8
I.4.	Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	9
I.4.1	Kewenangan Sesuai Dasar Hukum	10
I.4.2	Sumber Daya Manusia	10
I.4.3	Anggaran	10
I.4.4	Isu Strategi	11
I.4.5	Permasalahan	12
I.5.	Sistematika Laporan	16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1.	Uraian Singkat Perencanaan Strategis	18
II.2.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	21
II.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1.	Tahapan Pengukuran Kinerja.....	30
III.2.	Pengukuran Capaian Kinerja.....	31

III.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2019.....	37
III.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	56
III.5.	Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	69
III.6.	Realisasi Anggaran.....	73
III.7.	Alokasi Total Anggaran Tahun 2019.....	73
III.8.	Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja....	74
III.9.	Hambatan dan Kendala.....	75

BAB IV

PENUTUP

IV.	Kesimpulan.....	96
-----	-----------------	----

LAMPIRAN

Lampiran I.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
Lampiran II.	Rencana Aksi Tahun 2019
Lampiran III.	Penetapan Kinerja Tahun 2019
Lampiran IV.	Revisi Penilaian Kinerja Tahun 2019



BAB I PENDAHULUAN



PERHUBUNGAN
Transportation

Perumahan 2 Jakarta 10110



I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dituntut untuk menyelenggaraan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dalam rangka memenuhi capaian target kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Balai Pengelola Transportasi Darat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai bagian dari

instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2019.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dibentuk pada bulan Juli Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan klasifikasinya termasuk kelas Tipe C yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

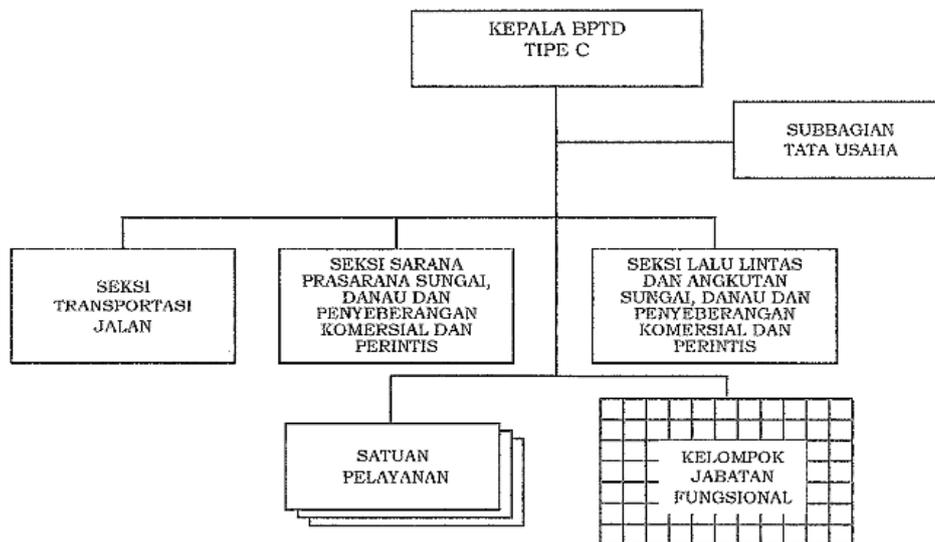
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri ;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan ;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan,

pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

I.2.1. Sub Bagian Tata Usaha

Adapun tugas Kepala Subbag Tata Usaha BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan rencana, program, dan anggaran;

- b. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
- c. Menyusun bahan pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
- f. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- g. Menyusun bahan evaluasi dan laporan.

I.2.2. Seksi Transportasi Jalan

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal Tipe A, Terminal Barang , UPPKB;
- b. Menyusun bahan pelaksanaak kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan;
- d. Menyusun bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalann nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan insdustri karoseri;
- e. Menyusun bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dim jalan nasional;
- f. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang;
- g. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

I.2.3. Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan;
- b. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP;
- d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. Menyusun bahan pelayanan jasa kepelabuhanan sungai, danau, dan penyeberangan;
- g. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

I.2.4. Seksi Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Adapun tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis :

- a. Menyusun bahan rencana pembangunan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
- b. Menyusun bahan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang

- belum diusahakan secara komersial;
- c. Menyusun bahan peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
 - d. Menyusun bahan pengawasan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
 - e. Menyusun bahan evaluasi peningkatan sarana prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial;
 - f. Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan oleh pimpinan

I.2.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Pelayanan beroperasi yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :

1. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
2. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok;
3. Satuan pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo;
4. Satuan pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur menaungi sebanyak 134 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 64 Pegawai.
- 2) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Kefa sebanyak 6 Pegawai.
- 3) Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sebanyak 23 Pegawai.
- 4) Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo sebanyak 4 Pegawai.

- 5) Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Bolok sebanyak 10 Pegawai.
- 6) Satuan Pelayanan UPPKB Nun Baun Sabu sebanyak 27 Pegawai.

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung memetakan potensi, Isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi.

I.4.1. Kewenangan Sesuai Dasar Hukum

- a. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
- c. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. KM. NO. 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. PM RI No. 154 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan PM RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- f. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bagian Keempat : Kewajiban Badan Publik Pada Pasal 7 :
 - 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai BPTD.

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 154 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat.

Potensi pengembangan pada bidang Transportasi darat adalah sebagai berikut :

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran

- serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan lingkungan.

I.4.4. Isu Strategi

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
- b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim;
- c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim / cuaca ekstrim;
- e. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim /cuaca ekstrim;
- f. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
- g. Pengadaan subsidi perintis damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Maluku Utara;
- h. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;

- i. Peningkatan Kapasitas Jaringan Pejalan Kaki pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan.

I.4.5. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pengelola Transportasi Darat meliputi :

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan SDM dan sistem manajemen;
 - b. Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
 - c. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antar kota antar provinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah;
 - d. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - e. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;

- 2) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
 - 3) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - 4) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal; Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
 - 5) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
- f. Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
- g. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
- 1) Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - 2) Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
 - 3) Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
 - 4) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - 5) Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi

domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri);

- 6) Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan "road pricing" yang belum tepat sasaran;
- 7) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- 8) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

B. Permasalahan Transportasi sungai Danau dan Penyeberangan

1. Belum adanya data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
2. Masih belum tersusunnya data mengenai sarana prasarana transportasi penyeberangan;
3. Ketersediaan data trayek transportasi SDP di beberapa daerah belum tersimpan dengan baik;
4. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
5. Belum dilaksanakannya penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi

dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;

6. Belum adanya buku petunjuk pelayaran di sungai dan danau.

C. Permasalahan Transportasi Perkotaan

1. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
5. Kemacetan lalu lintas;
6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

D. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2019 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahunan
3. Perjanjian Kinerja
4. Indikator Kinerja Utama
5. Pengukuran Kinerja
6. Evaluasi Kinerja

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja (Termasuk Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Unit Kerja)
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)
- I.5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis (Termasuk Arah Kebijakan dan Strategi)
- II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
- III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2019
- III.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2019
- III.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya
- III.6. Realisasi Anggaran
- III.7. Alokasi Total Anggaran Tahun 2019
- III.8. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- III.9. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

LAMPIRAN

- Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
- Lampiran II. Rencana Aksi Tahun 2019
- Lampiran III. Penetapan Kinerja Tahun 2019
- Lampiran IV. Revisi Penilaian Kinerja Tahun 2019



BAB II PERENCANAAN KINERJA



II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2020 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2019.

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat	
		a. Jumlah Delineator	Unit
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit
e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan	Lokasi
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan
		10. Jumlah Momitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(5)
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan

II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	9
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7
2	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	1197
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	461
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	399
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit	21
		e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	1
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	1838
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9
4	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	28
5	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4
6	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRLI	Lokasi	3
7	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2019 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan PM 56 Tahun 2016 tentang Balai Pengelola Transportasi Darat.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 150.981.7753.000,- adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	9
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7
2	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	1197
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	461
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	399
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit	21

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan	Lokasi	1
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	1838
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9
4	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	28
5	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4
6	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRLI	Lokasi	3

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
7	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-Performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi darat dengan masing-masing pelaksana di Seksi teknis dan Satuan Pelayanan.

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase pengukuran IKU (Unit)

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \text{ a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2019

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat 2019-2020, bermuara pada terwujudnya tujud Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 2019-2020.

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019					
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN			
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
1. TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN PENINGKATAN ANGKUTAN PERKOTAAN									
1.	JUMLAH TRAYEK KEPERINTISAN ANGKUTAN JALAN	TRAYEK	33	33	100	0	0	0	33
2.	JUMLAH LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN KOMERSIL	LINTAS	9	9	100	0	0	0	9
3.	JUMLAH LINTAS ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS	LINTAS	7	7	100	0	0	0	7
2. TERWUJUDNYA KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN									
4.	JUMLAH DELINEATOR	UNIT	1,197	1.197	100	0	0	0	1.197
5.	JUMLAH RAMBU LALU LINTAS	UNIT	461	461	100	0	0	0	461
6.	JUMLAH ALAT PENERANGAN JALAN	UNIT	399	399	100	0	0	0	399
7.	JUMLAH RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN	UNIT	21	21	100	0	0	0	21
8.	JUMLAH TERMINAL END LENGKUNG	UNIT	56	56	100	0	0	0	56
9.	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN YANG DIPELIHARA	KEGIATAN	1	1	100	0	0	0	1
10.	JUMLAH REHABILITASI UPPKB	LOKASI	1	1	100	0	0	0	1
11.	JUMLAH UPPKB YANG DIOPERASIONALKAN	LOKASI	1	1	100	0	0	0	1

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019					
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN			
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
12.	JUMLAH MONITORING DAN PENGAWASAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	KEGIATAN	16	16	100	0	0	0	16
13.	JUMLAH MONITORING DAN PENGAWASAN LLAJ	KEGIATAN	23	23	100	0	0	0	23
14.	JUMLAH MONITORING DAN PENGAWASAN SDP	KEGIATAN	13	13	100	0	0	0	13
15.	JUMLAH KONTINGENSI BENCANA DAN TANGGAP DARURAT	KEGIATAN	3	3	100	0	0	0	3
16.	JUMLAH MONITORING DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT	KEGIATAN	16	16	100	0	0	0	16
17.	TERLAKSANANYA MONITORING DAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU	KEGIATAN	4	4	100	0	0	0	4
18.	JUMLAH ATCS LANJUTAN	KOTA	1	1	100	0	0	0	1
19.	JUMLAH ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN (GUARD RAIL)	UNIT	751	751	100	0	0	0	751

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019					
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN			
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
3. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT									
20.	JUMLAH FREKUENSI PELAYANAN PADA LINTAS PENYEBERANGAN	TRIP	1,838	1.838	100	0	0	0	1.838
21.	PROSENTASE KAPAL PENYEBERANGAN PADA LINTAS UTAMA YANG MEMENUHI SPM	%	100	100	100	0	0	0	100
22.	PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI DARAT	%	100	100	100	0	0	0	100
23.	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN	KAB/KOTA	9	9	100	0	0	0	9
4. MENINGKATNYA KUALITAS DAN KINERJA ASN BPTD									
24.	PEGAWAI YANG SUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT	ORANG	37	37	100	0	0	0	37
25.	TERLAKSANANYA BIMTEK DAN SOSIALISASI BPTD	KEGIATAN	28	28	100	0	0	0	28
26.	TERLAKSANANYA PENINGKATAN MOTIVASI PEGAWAI BPTD WIL XIII PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	KEGIATAN	1	1	100	0	0	0	1

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019					
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN			
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
5. MENINGKATNYA KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT									
27.	JUMLAH PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBERANGAN	LOKASI	3	3	100	0	0	0	3
28.	JUMLAH REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN	LOKASI	1	1	100	0	0	0	1
29.	JUMLAH PEMBANGUNAN TERMINAL	LOKASI	4	4	100	0	0	0	4
6. MENINGKATNYA APLIKASI SKEMA MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN									
30.	JUMLAH PENERAPAN MRLI	LOKASI	3	3	100	0	0	0	3
7. TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI BPTD									
31.	NILAI AKIP	NILAI	83,8	83,8	100	0	0	0	83,8
32.	TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN	%	99,17	99,17	100	0	0	0	99,17
33.	NILAI ASET YANG DIINVENTARISASI	RP	826.120.188.091	826.120.188.091	100	0	0	0	826.120.188.091
34.	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN PERKANTORAN	BULAN	12	12	100	0	0	0	12
35.	PENYELENGGARAAN BELANJA PEGAWAI TERMASUK TUNJANGAN	BULAN	12	24	200	0	0	0	24

Tabel Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

III.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Revisi PK Tahun 2019

Selama tahun 2019, ada 7 Sasaran Strategis (SS) dan di dalamnya terdapat 35 Indikator Kinerja (IK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada IK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, berdasarkan Tipologi Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah BPTD tipe C yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis. BPTD tipe C mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan mewujudkan

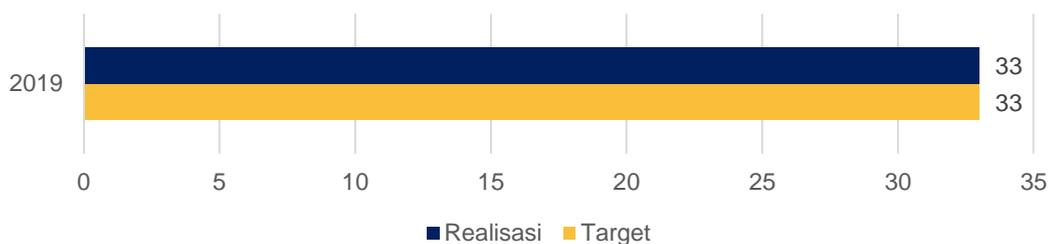
pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas.

Pencapaian SS 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 1) Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan, IK 2) Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil, IK 3) Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis

IK.1 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan

Capaian jumlah trayek keperintisan angkutan jalan tahun 2019 sebesar 33 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 33 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.1 Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan.

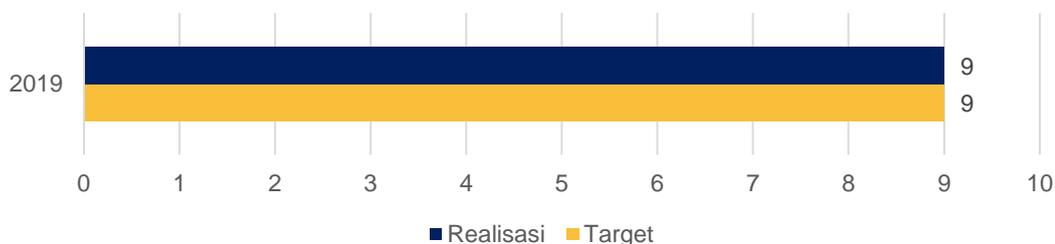
Grafik III.1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan.



IK.2 Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Komersial

Capaian jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Komersial 2019 sebesar 9 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 9 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.2 Lintasan Angkutan Penyeberangan Komersial.

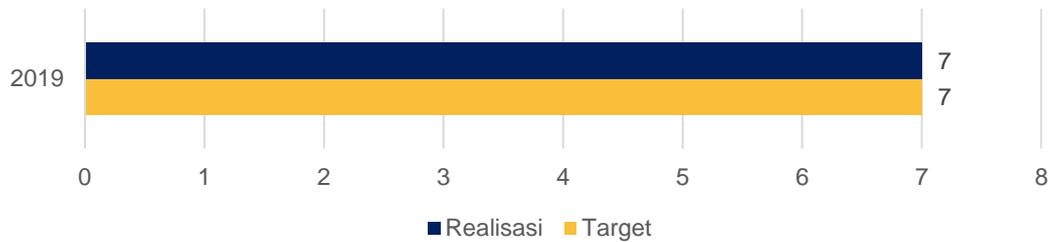
Grafik III. 2. Jumlah Lintasan Angkutan Penyeber. Komersial



IK.3 Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis

Capaian jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis tahun 2019 sebesar 7 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 7 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.3. jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis

Grafik III. 3. Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis



Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

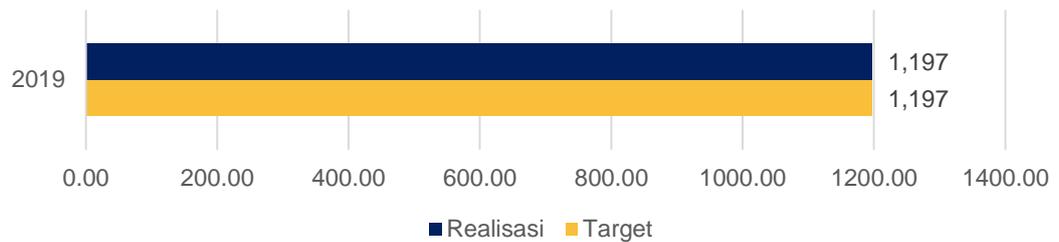
Pencapaian SS 2 diukur melalui 16 (enam belas) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 4) Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat. IK 4 terbagi menjadi 9 yakni : a. Jumlah Delineator, b. Jumlah Rambu Lalu Lintas, c. Jumlah Alat Penerang Jalan, d. Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail), f. Jumlah Terminal End Lengkung, g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara, h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB, IK 5) Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan, IK 6) Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat. IK 7) Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ, IK 8) Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP, IK 9) Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat, IK 10) Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat, IK 11) Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan IK 12) Jumlah ATCS Lanjutan

IK.4 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat

a. Jumlah Delineator

Capaian jumlah Delineator tahun 2019 sebesar 1197, jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1197 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.a. Jumlah Delineator.

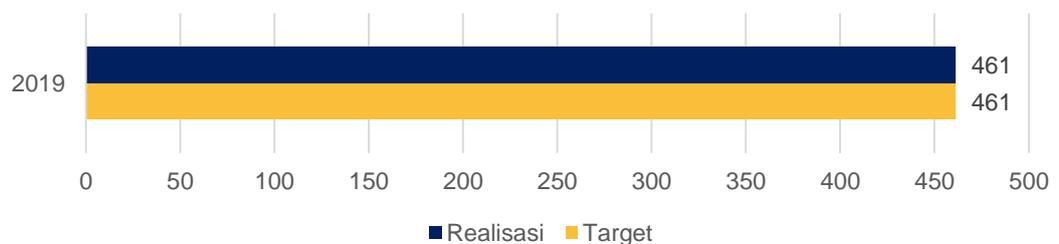
Grafik III. 4.a. Jumlah Delineator



b. Jumlah Rambu Lalu Lintas

Capaian jumlah rambu lalu lintas tahun 2019 sebesar 461 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 461 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.b. Jumlah rambu lalu lintas.

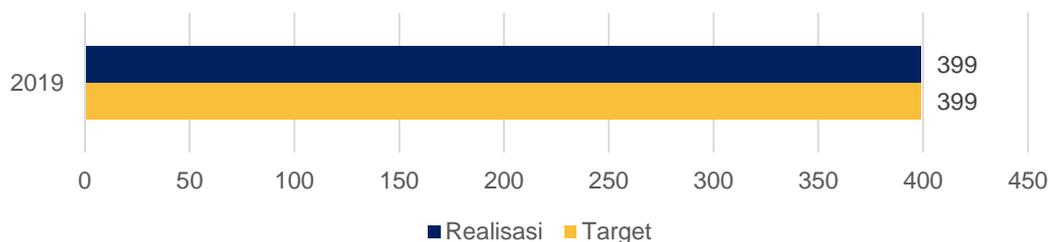
Grafik III. 4b. Jumlah rambu lalu lintas



c. Jumlah Alat Penerang Jalan

Capaian jumlah Alat Penerang Jalan tahun 2019 sebesar 399 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 399 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.c. Alat Penerang Jalan.

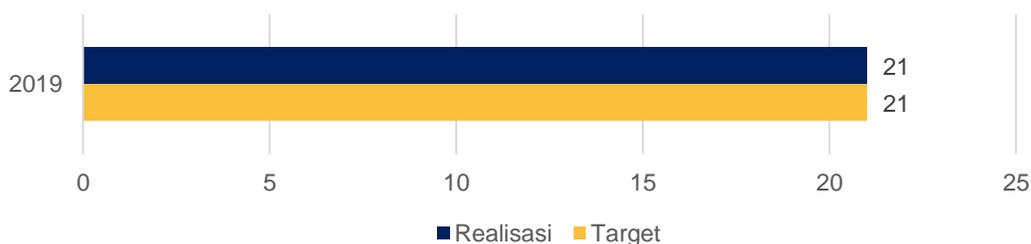
Grafik III. 4.c. Jumlah alat Penerang Jalan



d. Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

Capaian jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan tahun 2019 sebesar 21 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 21 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.d. Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan

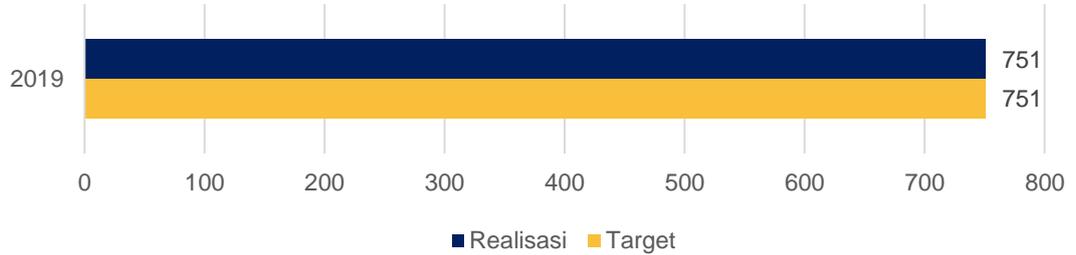
Grafik III. 4.d. Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan



e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)

Capaian jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail) tahun 2019 sebesar 751 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 751 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)

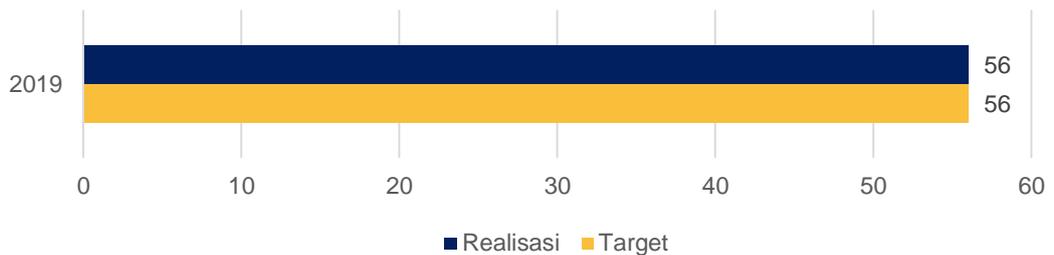
Grafik III. 4.e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)



f. Jumlah Terminal End Lengkung

Capaian jumlah Terminal End Lengkung tahun 2019 sebesar 56 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 56 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.f. Jumlah Terminal End Lengkung

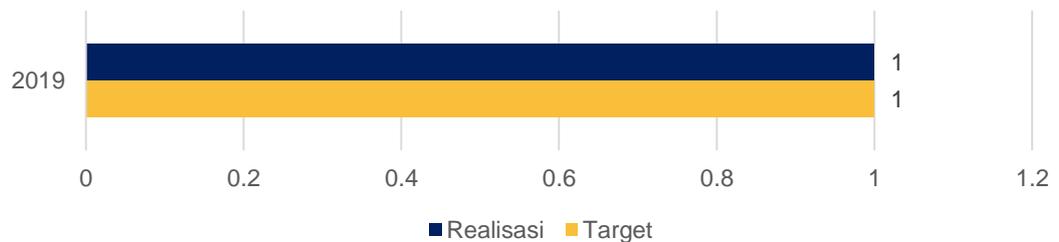
Grafik III. 4.f. Jumlah Terminal End Lengkung



g. Jumlah Perlengkapan yang dipelihara

Capaian jumlah Perlengkapan yang dipelihara tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.g. Jumlah Perlengkapan yang dipelihara

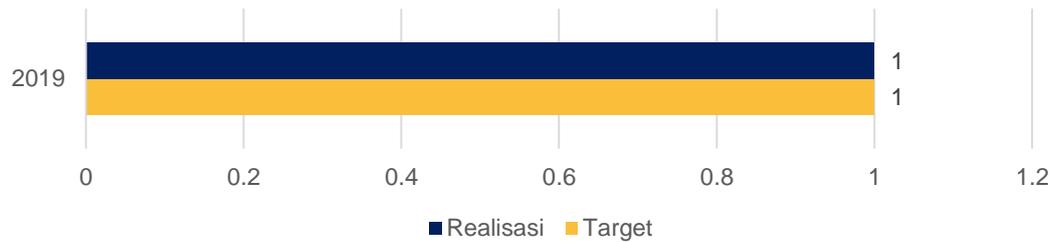
Grafik III. 4.f. Jumlah Perlengkapan yang dipelihara



h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB

Capaian jumlah rehabilitasi UPPKB tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III. 4.h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB.

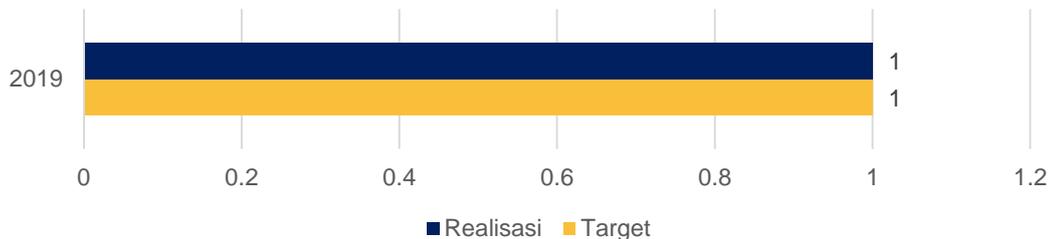
Grafik III. 4.h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB



IK.5 Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan

Capaian jumlah UPPKB yang dioperasionalkan tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan.

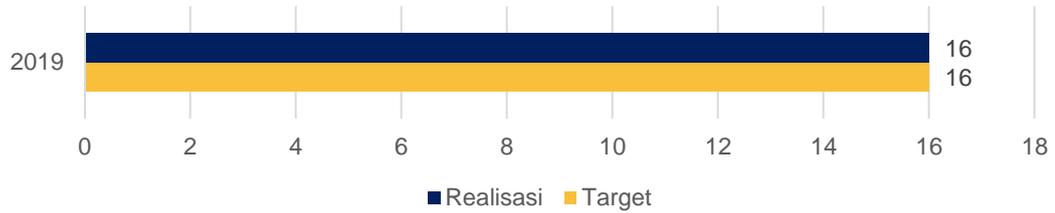
Grafik III.5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan



IK.6 Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Capaian jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat tahun 2019 sebesar 16 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 16 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.6. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.

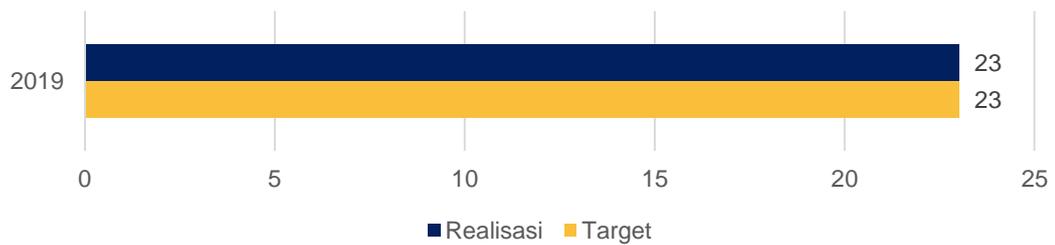
Grafik III.6. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat



IK.7 Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ

Capaian jumlah monitoring dan pengawasan LLAJ tahun 2019 sebesar 23 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 23 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ

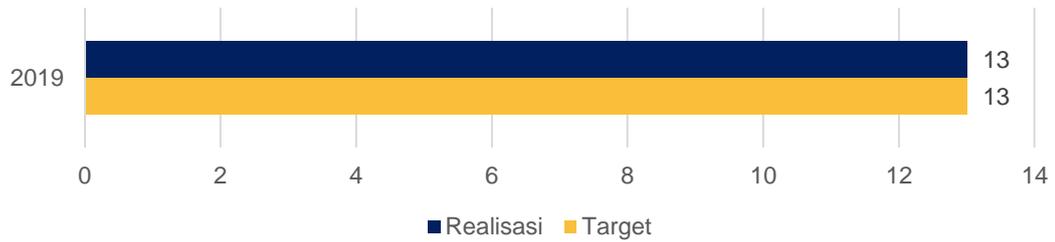
Grafik III.7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ



IK.8 Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP

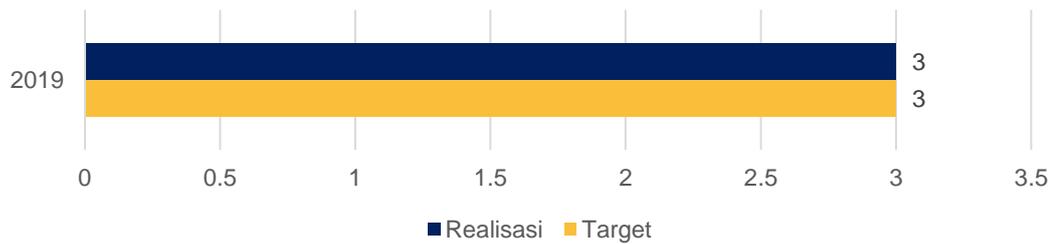
Capaian jumlah monitoring dan pengawasan SDP tahun 2019 sebesar 13 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 13 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP.

Grafik III.8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP

**IK.9 Jumlah Kontigensi Bencana dan Tanggap Darurat**

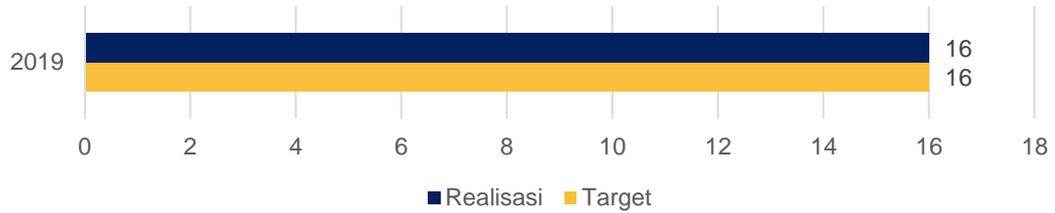
Capaian jumlah kontigensi bencana dan tanggap darurat tahun 2019 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.9. Jumlah Kontigensi Bencana dan Tanggap Darurat.

Grafik III.9. Jumlah Kontigensi Bencana dan Tanggap Darurat

**IK.10 Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat**

Capaian jumlah monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat tahun 2019 sebesar 16 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 16 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat.

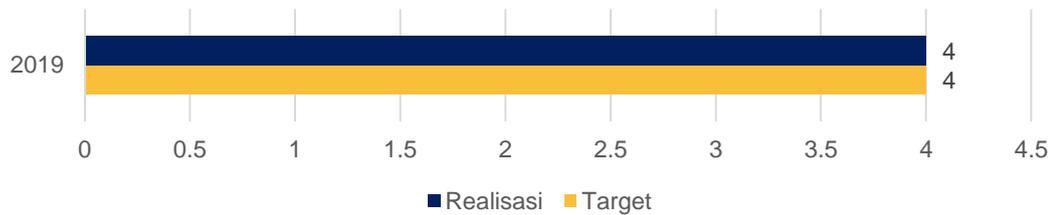
Grafik III.10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat



IK.11 Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat

Capaian terlaksananya monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat tahun 2019 sebesar 4 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 4 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.11. Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat.

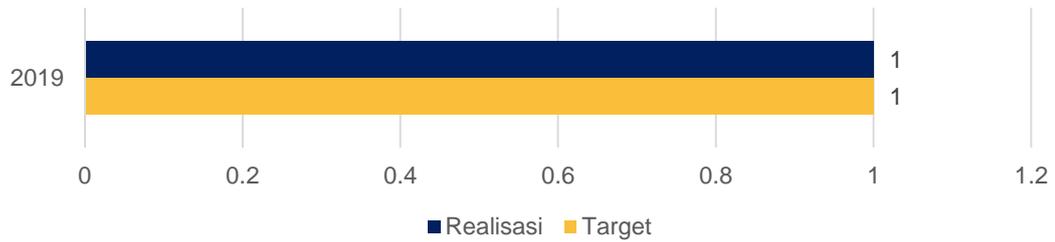
Grafik III.11. Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat



IK.12 Jumlah ATCS Lanjutan

Capaian jumlah ATCS Lanjutan tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat.

Grafik III.12. Jumlah ATCS Lanjutan



Sasaran Strategis 3

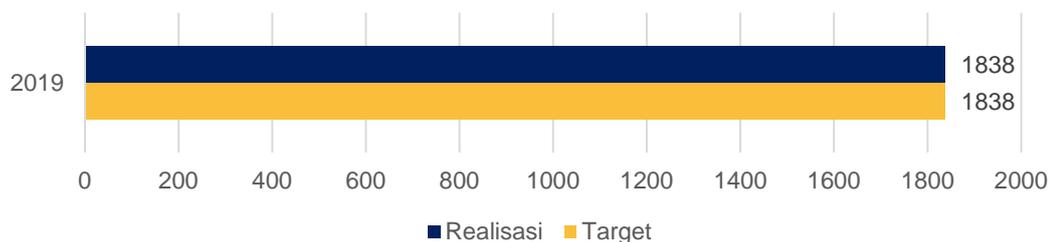
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pencapaian SS 3 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 13) Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan, IK 14) Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM, IK 15) Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat, IK 16) Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan.

IK.13 Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan

Capaian jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan tahun 2019 sebesar 1838 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1838 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.13. Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan.

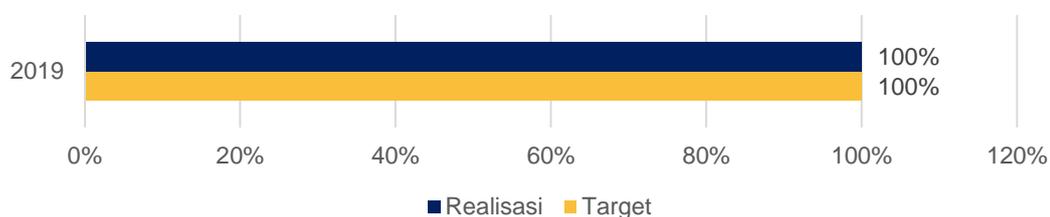
Grafik III.13. Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan



IK.14 Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM

Capaian persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.14. Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM.

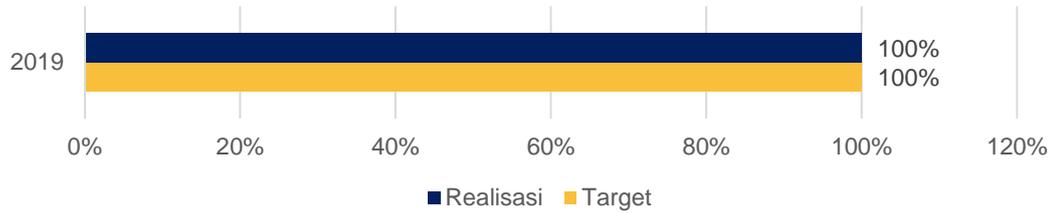
Grafik III.14. Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM



IK.15 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat

Capaian persentase capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat tahun 2019 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.14. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat.

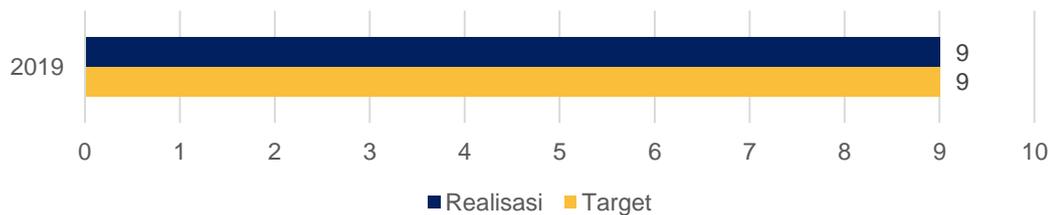
Grafik III.15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat



IK.16 Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

Capaian jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan tahun 2019 sebesar 9 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 9 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.16. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan.

Grafik III.16. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan



Sasaran Strategis 4

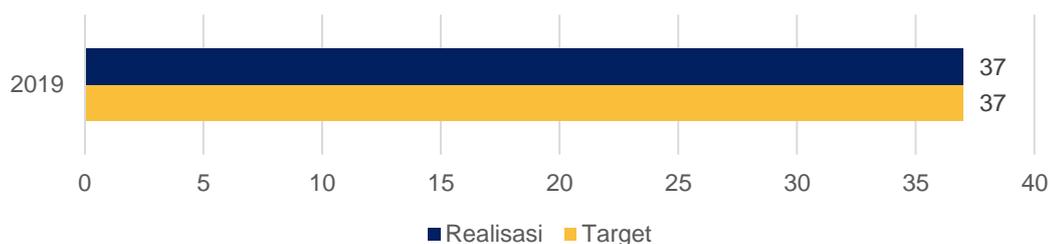
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD

Pencapaian SS 4 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 17) Jumlah Pegawai yang Sudah Memiliki Sertifikat, IK 18) Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT, dan IK 19) Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD.

IK.17 Jumlah Pegawai yang Sudah Memiliki Sertifikat

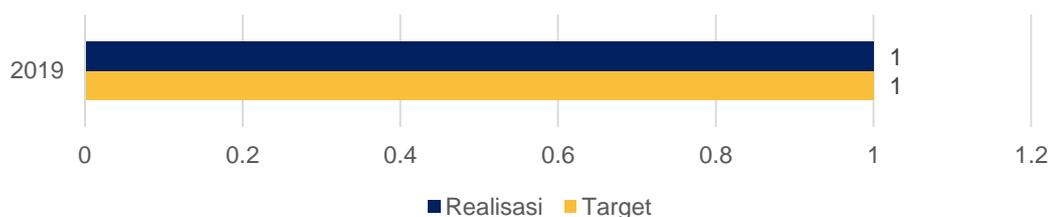
Capaian jumlah pegawai yang sudah memiliki sertifikat tahun 2019 sebesar 37 jika dibandingkan target PK 2019 sebesar 37 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.17. Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat

Grafik III.17. Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat

**IK.18 Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT**

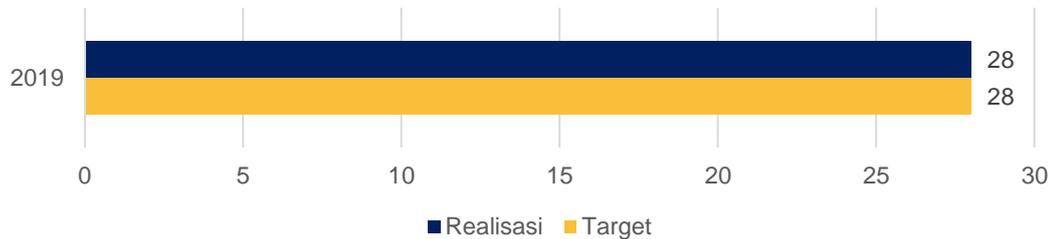
Capaian terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD wil. XIII Prov. NTT tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.18. Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT.

Grafik III.18. Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT

**IK.19 Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD**

Capaian terlaksananya bimtek dan sosialisasi BPTD tahun 2019 sebesar 28 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 28 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.19. Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD.

Grafik III.19. Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD



Sasaran Strategis 5

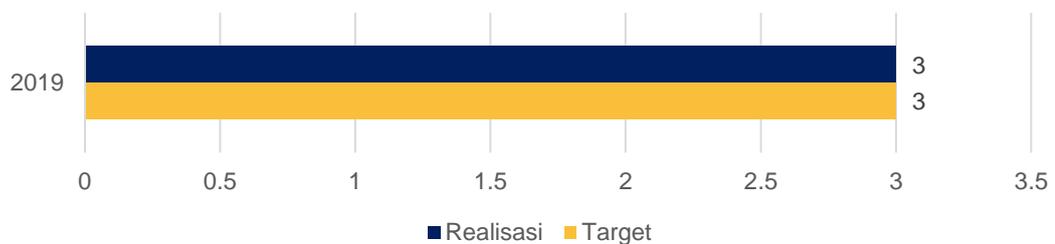
**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana
Transportasi Darat**

Pencapaian SS 5 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 20) Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, IK 21) Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan dan IK 22) Jumlah Pembangunan Terminal.

IK.20 Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Capaian jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan tahun 2019 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan.

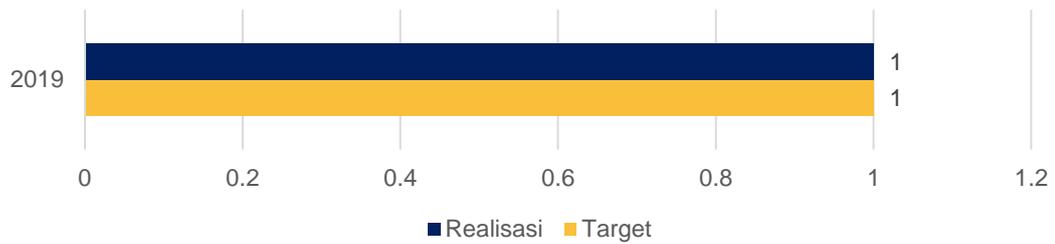
Grafik III.20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan



IK.21 Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

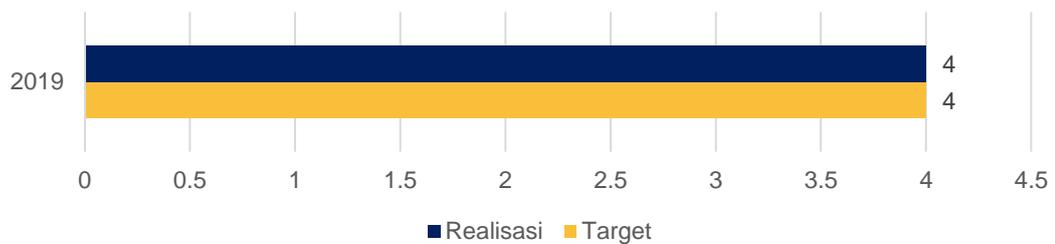
Capaian jumlah rehabilitasi pelabuhan penyeberangan tahun 2019 sebesar 1 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 1 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan.

Grafik III.21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

**IK.22 Jumlah Pembangunan Terminal**

Capaian jumlah pembangunan terminal tahun 2019 sebesar 4 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 4 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.22. Jumlah Pembangunan Terminal.

Grafik III.22. Jumlah Pembangunan Terminal





Sasaran Strategis 6

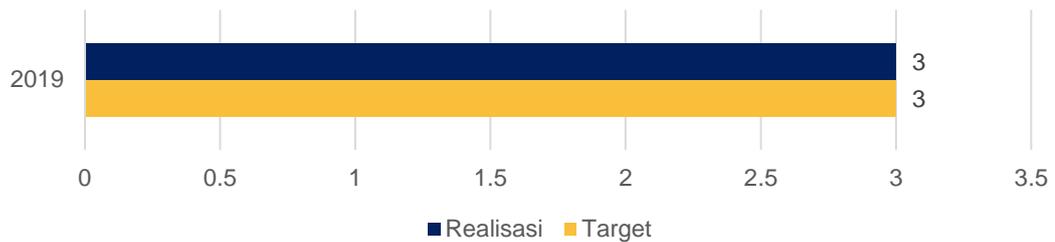
Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen
Transportasi Perkotaan

Pencapaian SS 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 23) Jumlah Penerapan MRLL.

IK.23 Jumlah Penerapan MRLL

Capaian jumlah penerapan MRLL tahun 2019 sebesar 3 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 3 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.23. Jumlah Penerapan MRLL.

Grafik III.23. Jumlah Penerapan MRLL



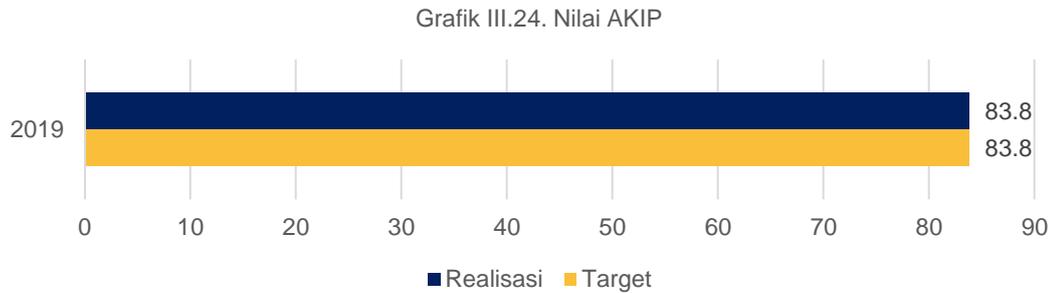
Sasaran Strategis 7

Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance
di BPTD

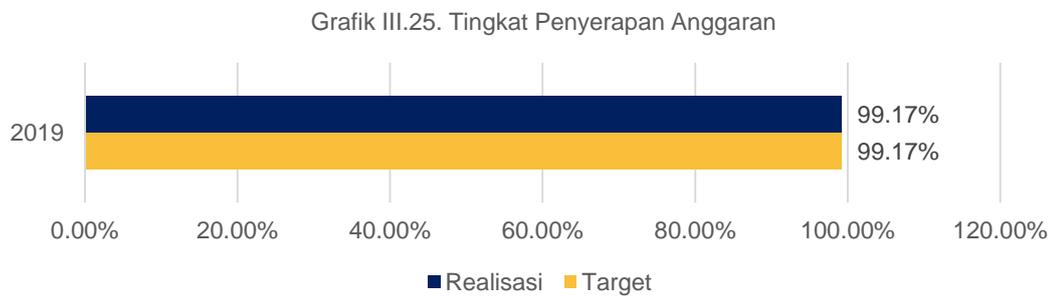
Pencapaian SS 7 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 24) Nilai AKIP, IK 25) Tingkat Penyerapan Anggaran, IK 26) Nilai Aset yang diinventarisasi, IK 27) Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran, dan IK 28) Penyelenggaraan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan.

IK.24 Nilai AKIP

Capaian nilai AKIP tahun 2019 sebesar 83,8 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 83,8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.24. Nilai AKIP

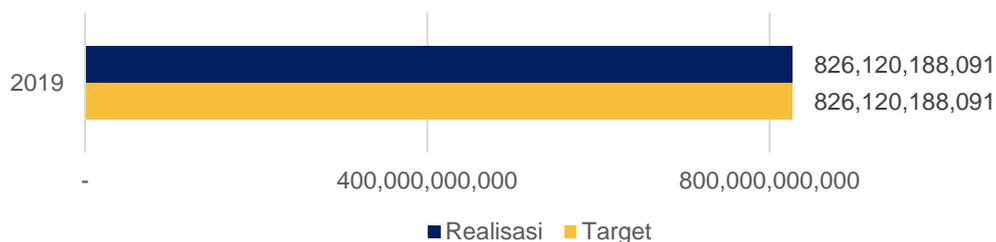
**IK.25 Tingkat Penyerapan Anggaran**

Capaian tingkat penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar 99,17 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 99,17 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.25. Tingkat Penyerapan Anggaran

**IK.26 Nilai Aset yang diinventarisasi**

Capaian nilai aset yang diinventarisasi tahun 2019 sebesar 826.120.188.091 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 826.120.188.091 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.26. Nilai Aset yang diinventarisasi

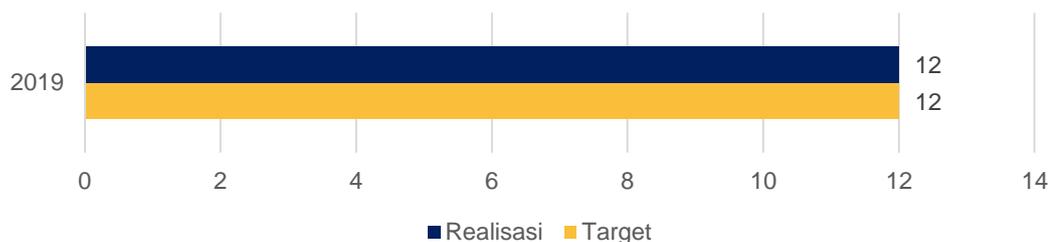
Grafik III.26. Nilai Aset yang diinventarisasi



IK.27 Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

Capaian penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran tahun 2019 sebesar 12 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 12 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.27. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

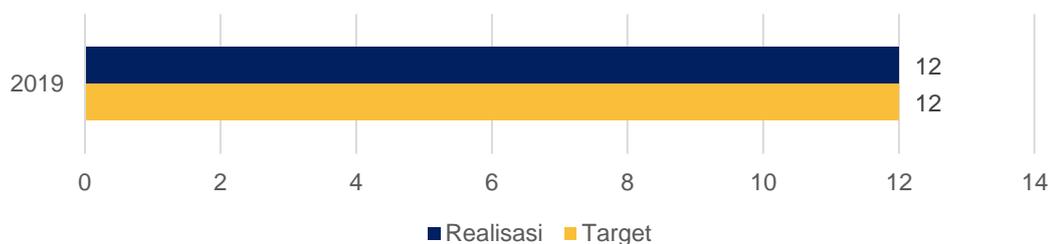
Grafik III.27. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran



IK.28 Penyelenggaraan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan

Capaian penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan tahun 2019 sebesar 12 jika dibandingkan dengan target PK 2019 sebesar 12 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.28. Penyelenggaran Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan

Grafik III.28. Penyelenggaran Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan



III.4. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan

IK 1. Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan

Capaian kinerja Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan adalah 100% dikarenakan targetnya telah disesuaikan dengan usulan kebutuhan trayek dari daerah. Jumlah trayek perintis Nusa Tenggara Timur dimana pada tahun 2019 menargetkan 33 trayek perintis yang akan dilayani sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5630/AJ.204/DRJD/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2019 maka realisasi trayek perintis Nusa Tenggara Timur di tahun 2019 memenuhi target.

IK 2. Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil

Capaian kinerja Jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Komersil adalah 100%. Dimana berdasarkan pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat realisasi sesuai target untuk jumlah trayek angkutan penyeberangan komersial.

IK 3. Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis

Capaian kinerja jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Perintis adalah 100% dikarenakan targetnya telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

**Sasaran Strategis 2**

Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pencapaian SS 2 diukur melalui 16 (enam belas) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 4) Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat. IK 4 terbagi menjadi 8 yakni : a. Jumlah Delineator, b. Jumlah Rambu Lalu Lintas, c. Jumlah Alat Penerangan Jalan, d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan, e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail), f. Jumlah Terminal End Lengkung, g. Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara, h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB, IK 5) Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan, IK 6) Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, IK 7) Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ, IK 8) Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP, IK 9) Jumlah Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat, IK 10) Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat, IK 11) Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan IK 12) jumlah ATCS Lanjutan. .

IK 4. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat

Capaian kinerja jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat adalah 100%. Pembangunan perlengkapan jalan yang menggunakan

dana APBN masih menggunakan konsep pendekatan mengikuti ruas jalan yang terdiri dari beberapa jenis perlengkapan jalan. Pada saat perencanaan pembangunan perlengkapan jalan biasanya akan berbeda pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikarenakan kondisi fisik di lapangan yang memungkinkan terjadinya perubahan jenis perlengkapan jalan yang dipasang serta perubahan volume perlengkapan jalan yang terpasang pada suatu ruas jalan, untuk itu diperlukan persiapan dan penggunaan metode yang tepat dalam pelaksanaan pengumpulan data kebutuhan perlengkapan jalan.

Alternatif solusi agar capaian kinerja dapat tercapai antara lain dengan melaksanakan pendalaman pada saat perencanaan pembangunan perlengkapan jalan. Alternatif solusi yang lainnya antara lain konsep pengadaan perlengkapan jalan dengan konsep mengikuti jenis perlengkapan jalan sehingga data yang tercantum akan lebih mudah dianalisa maupun dievaluasi.

a. Jumlah Marka Jalan

Dari target pembangunan Deliniator pada tahun 2019 sebesar 1.197 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 1.197 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan Deliniator dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah Deliniator yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

b. Jumlah Rambu Lalu Lintas

Dari target pembangunan Rambu Lalu Lintas pada tahun 2019 sebesar 461 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 461 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah Rambu Lalu Lintas yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c. Jumlah Alat Penerangan Jalan

Dari target pembangunan alat penerangan jalan pada tahun 2019 sebesar 399 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 399 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan ini dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah alat penerangan jalan yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

Dari target rambu pendahulu petunjuk jurusan pada tahun 2019 sebesar 21 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 21 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan rambu pendahulu petunjuk jurusan ini dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah rambu pendahulu petunjuk jurusan yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)

Dari target alat pengendali dan pengaman pengguna jalan (guard rail) pada tahun 2019 sebesar 751 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 751 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan (guard rail) ini dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah alat pengendali dan pengaman pengguna jalan (guard rail) yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih

dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

f. Jumlah Terminal End Lengkung

Dari target terminal end lengkung pada tahun 2019 sebesar 56 unit dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 56 unit atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Pengadaan dan pemasangan terminal end lengkung ini dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah terminal end lengkung yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

g. Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara

Dari target kegiatan perlengkapan jalan yang dipelihara pada tahun 2019 sebesar 1 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 1 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Kegiatan perlengkapan jalan yang dipelihara ini dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ruas jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian kinerja jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum melaksanakan kegiatan telah dilakukan survey lokasi terlebih dahulu terhadap ruas jalan yang akan dipasang sebelum dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB

Capaian kinerja Rehabilitasi UPPKB adalah 100% dimana dalam realisasinya pekerjaan yang dilakukan untuk melakukan pembenahan, penataan dan peningkatan fasilitas UPPKB Nun Baun Sabu yang meliputi pembangunan kembali gedung kantor, jembatan timbang, pagar dan pemasangan lampu penerangan kawasan UPPKB serta pengadaan dan pemasangan lahan parkir bagi kendaraan yang hendak ditimbang.

IK 5. Jumlah UPPKB Yang dioperasionalkan

Capaian kinerja UPPKB yang dioperasionalkan adalah 100% dimana dalam realisasinya UPPKB Nun Baun Sabu dioperasikan kembali pada tanggal 4

Juli 2019 guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan infrastruktur jalan dari kendaraan bermotor yang over dimensi dan over load.

IK 6. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Dari target kegiatan monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat pada tahun 2019 sebesar 16 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 16 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat yang akan dimonitoring.

IK 7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ

Dari target kegiatan monitoring dan pengawasan LLAJ pada tahun 2019 sebesar 23 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 23 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah monitoring dan pengawasan LLAJ yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP

Dari target kegiatan monitoring dan pengawasan SDP pada tahun 2019 sebesar 13 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 13 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah monitoring dan pengawasan SDP yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 9. Jumlah Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat

Dari target kegiatan kontingensi bencana dan tanggap darurat pada tahun 2019 sebesar 3 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 3 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah kontingensi bencana dan tanggap darurat yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat

Dari target kegiatan monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat pada tahun 2019 sebesar 16 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 16 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah monitoring dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bidang perhubungan darat darurat yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 11. Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Dari target terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru pada tahun 2019 sebesar 4 kegiatan dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 4 kegiatan atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 12. Jumlah ATCS Lanjutan

Capaian kinerja Jumlah ATCS Lanjutan adalah 100% dimana dalam realisasinya pekerjaan yang dilakukan adalah pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu lintas, kamera PTZ, Pemasangan link dan interior ruang kendali CC Room. Pengadaan dan pemasangan ATCS ini berada dilokasi 3 titik Simpang 4 Kota Kupang.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pencapaian SS 3 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 13) Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan, IK 14) Persentase Kapal Penyeberangan pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM, IK 15) Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat, dan IK 16) Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan.

IK 13. Jumlah Frekuensi Pelayanan Pada Lintas Penyeberangan

Dari target jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan pada tahun 2019 sebesar 1.838 trip dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 1.838 trip atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 14. Persentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utaman yang Memenuhi SPM

Dari target persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM pada tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat

Dari target persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi darat pada tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi darat yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 16. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan

Dari target jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan pada tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi pada tahun 2019 sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Capaian kinerja jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN BPTD

Pencapaian SS 4 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 17) Jumlah Pegawai yang sudah Memiliki Sertifikat, IK 18) Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT, dan IK 19) Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD.

IK 17. Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat

Dari target Pemberian Sertifikat Kualifikasi Teknis Pegawai di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan realisasinya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Sertifikat yang diperoleh berasal dari kegiatan Diklat dan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh pegawai Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diklat dan Bimbingan Teknis yang diikuti meliputi : Diklat PPNS, Bimtek Perlengkapan Jalan, Diklat Hospitality, Bimtek Manajemen Kecepatan, Bimtek Keuangan, Bimtek Inspektur Lalu Lintas, dan sebagainya

IK 18. Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur

Dari target terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 1 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja terlaksananya peningkatan motivasi pegawai

BPTD Wil. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.

IK 19. Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD

Dari target terlaksananya bimtek dan sosialisai BPTD pada tahun 2019 sebanyak 37 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 37 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja terlaksananya bimtek dan sosialisasi BPTD yang memenuhi target 100% dikarenakan sebelum pelaksanaan kegiatan telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu.



Sasaran Strategis 5

**Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana
Transportasi Darat**

Pencapaian SS 5 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 20) Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, IK 21) Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan, dan IK 22) Jumlah Pembangunan Terminal.

IK 20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

Dari target jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan pada tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 3 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja jumlah pembangunan pelabuhan penyeberangan yang memenuhi target 100% dikarenakan merupakan program pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan dari tahun sebelumnya berupa Pelabuhan Penyeberangan Raijua, Pelabuhan Penyeberangan Bakalang, dan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu.

IK 21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Dari target jumlah rehabilitasi pelabuhan penyeberangan pada tahun 2019 sebanyak 1 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 1 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja jumlah rehabilitasi pelabuhan penyeberangan yang memenuhi target 100% dikarenakan merupakan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa angkutan penyeberangan dengan meningkatkan prasarannya. Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan tersebut adalah pelabuhan penyeberangan kalabahi.

IK 22. Jumlah Pembangunan Terminal

Dari target jumlah pembangunan terminal pada tahun 2019 sebanyak 4 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 4 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja jumlah pembangunan terminal yang memenuhi target 100% dikarenakan merupakan program pembangunan terminal lanjutan dari tahun sebelumnya berupa Terminal Barang Internasional Mota'ain, Terminal Barang Internasional Motamasin, Terminal Barang Internasional Wini dan Terminal Penumpang Tipe A Bimoku.

**Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan

Pencapaian SS 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 23) Jumlah Penerapan MRLL.

IK 23. Jumlah Penerapan MRLL

Dari target jumlah penerapan MRLL pada tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan dengan realisasinya sebanyak 3 kegiatan atau capaian kinerjanya 100%. Capaian kinerja jumlah Penerapan MRLL yang memenuhi target 100% dikarenakan merupakan pengaturan dan penyederhanaan lalu lintas dengan melakukan pemisahan terhadap tipe, kecepatan dan pemakaian jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan lalu lintas.

**Sasaran Strategis 7**

Terwujudnya Good Governance dan Clean Governhance di BPTD

Pencapaian SS 7 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yaitu IK 24) Nilai AKIP, IK 25) Tingkat Penyerapan Anggaran, IK 26) Nilai Aset yang diinventarisasi, IK 27) Penyelenggaraan Administrasi dan

Layanan Perkantoran dan IK 28) Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan.

IK 24. Nilai AKIP

Indikator Capaian Nilai AKIP pada output kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Indikator Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga pada dasarnya capaian indikator Nilai AKIP Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan Indikator Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Indikator Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Mencapai pada Tahun 2019 adalah 83,8.

IK 25. Tingkat Penyerapan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dana tidak terserap TA. 2019 di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1.253.148.732,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Priorotas Nasional Rp. 14.965.600,-
- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Jalan (1162) sebesar Rp. 640.431.682,-
- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (1164) sebesar Rp. 790,-
- Sisa kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan (1950) sebesar Rp. 51.394.457,-
- Sisa kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat (1953) sebesar Rp. 480.523.607,-
- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda (5878) sebesar Rp. 63.322.300,-

IK 26. Nilai Aset Balai Pengelola Transportasi Darat yang berhasil diinventarisasi.

Hingga Desember 2019, Nilai Aset pada Neraca Unaudited 2019 Balai Pengelola Transportasi Darat adalah sebesar Rp. 826.120.188.091,-. Nilai Aset ini diperoleh dari hasil limpahan asset satker pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Timur dan Satker Pengembangan LLAJ

Nusa Tenggara Timur, Satker Perhubungan Darat Provinsi Nusa Tenggara Timur, UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi yang dilikuidasi pada tahun 2017 serta tambahan dari hasil kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat selama tahun 2019.

IK 27. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

Capaian kinerja Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran adalah 100% dimana dalam realisasinya merupakan kegiatan yang sifatnya operasional pelayanan kepada masyarakat yang meliputi operasional UPPKB Nun Baun Sabu, operasional Satpel Kalabahi, operasional Satpel Bolok, Operasional Satpel Labuan Bajo dan operasional Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IK 28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan

Capaian kinerja Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan adalah 100% dimana dalam realisasinya merupakan kegiatan Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Tunjangan Kinerja.

III.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya Kami sajikan dalam Tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan	6.339.066.000	6.337.814.500	1.251.500	99,98%
2	Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil	0	0	0	0
3	Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis	19.641.435.000	19.637.997.200	3.437.800	99,98%
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat	21.627.431.000	21.612.465.400	14.965.600	99,93%
	a. Jumlah Delineator	0	0	0	0
	b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	0	0	0	0
	c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	0	0	0	0
	d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	0	0	0	0
	e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Guard Rail)	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
	f. Jumlah Terminal End Lengkung	0	0	0	0
	g. Jumlah Perlengkapan jalan yang dipelihara	445.530.000	445.530.000	0	100%
	h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	500.000.000	495.242.000	4.758.000	99,05%
5	Jumlah UPPKB yang dioperasikan	1.791.622.000	1.469.187.861	322.434.139	82,00%
6	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	229.314.000	229.263.799	50.201	99,98%
7	Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	269.765.000	268.764.786	1.000.214	99,63%
8	Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	175.000.000	174.999.596	404	100,00%
9	Jumlah Kontigensi Bencana dan Tanggap Darurat	70.570.000	70.569.000	1.000	100,00%
10	Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	228.166.000	227.965.469	200.531	99,91%
11	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	369.031.000	343.010.906	26.020.094	92,95%

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
12	Jumlah ATCS Lanjutan	1.911.360.000	1.911.360.000	0	100,00%
13	Jumlah Frekuensi Pelayanan pada Lintas Penyeberangan	0	0	0	0
14	Persentase Kapal Penyeberangan pada Lintas Utama yang Memenuhi SPM	0	0	0	0
15	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	0	0	0	0
16	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	0	0	0	0
17	Jumlah Pegawai Yang sudah memiliki sertifikat	0	0	0	0
18	Terlaksananya Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Wil. XIII Prov. NTT	219.997.000	219.997.000	0	100,00%
19	Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BPTD	344.135.000	344.134.976	24	100,00%
20	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	32.709.722.000	32.709.721.210	790	100,00%
21	Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	1.708.804.000	1.708.804.000	0	100,00%

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan		
			Realisasi (Rp.)	Sisa Realisasi (Rp.)	% Realisasi
22	Jumlah Pembangunan Terminal	47.078.897.000	46.714.333.000	364.564.000	99,23%
23	Jumlah Penerapan MRL	0	0	0	0
24	Nilai AKIP	0	0	0	0
25	Tingkat Penyerapan Anggaran	150.981.775.000	149.728.626.268	1.253.148.732	99,17%
26	Nilai Aset yang diinventarisasi	826.120.188.091	826.120.188.091	0	100,00%
27	Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran	10.664.445.000	10.154.853.949	509.591.051	95,22
28	Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	4.625.485.000	4.622.304.302	3.180.698	99,93

III.6. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

III.7. Alokasi Total Anggaran Tahun 2019

Alokasi Anggaran Tahun 2019

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2019 sebesar **Rp. 156.892.602.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Rincian per Sumber Dana:

RM	:	Rp.	113.892.602.000,-	72,5%
PNBP	:	Rp.	43.000.000.000,-	27,5%
PLN	:	Rp.	-	0%

Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	Rp.	3.382.228.000,-	2,2%
Belanja Barang	Rp.	41.315.374.000,-	26,3%
Belanja Modal	Rp.	112.195.000.000,-	71,5%

Pagu setelah Efisiensi T.A. 2019 sebesar **Rp. 150.981.775.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pagu Awal DIPA	Rp.	156.892.602.000,-
2.	Pengurangan	Rp.	5.910.827.000
	a. Efisiensi	Rp.	5.910.827.000
	Pengurangan PNBP	Rp.	-
3.	Penambahan	Rp.	0,-
	Penambahan	Rp.	0,-
	Pekerjaan Badan		
	Pemasangan		
	Perlengkapan		
	Jalan		
4.	Pagu Akhir DIPA	Rp.	150.981.775.000,-,-

Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	Rp.	4.625.485.000	3,1%
Belanja Barang	Rp.	41.221.707 .000,-	27,3%
Belanja Modal	Rp.	105.134.583.000 ,-	69,6%

III.8. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dana tidak terserap TA. 2019 di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1.253.148.732- , dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional Rp. 14.965.600,-
- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Jalan (1162) sebesar Rp. 640.431.682,-

- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (1164) sebesar Rp. 790,-
- Sisa kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan (1950) sebesar Rp. 51.394.457,-
- Sisa kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat (1953) sebesar Rp. 480.523.607,-
- Sisa kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda (5878) sebesar Rp. 63.322.300,-

III.9. Hambatan dan Kendala

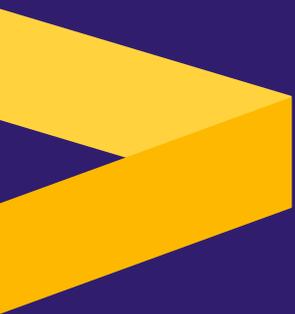
Hambatan/Kendala yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi daya serap anggaran Tahun Anggaran 2019 antara lain:

- Terdapat sisa kegiatan dari pekerjaan kontraktual yang bukan merupakan nominal kontraktual yang tidak terserap ;
- Terlambat dalam merevisi anggaran guna optimalisasi sisa belanja yang ada;
- Pekerjaan Dialihkan Ke Non Kontraktual (Karena Nilai Pekerjaan Di Bawah 50 Juta), Namun Terlambat Di Daftarkan di KPPN sehingga dana tidak bisa dicairkan.
-



BAB IV PENUTUP





IV.1. Kesimpulan

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari LAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2019-2020, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2019 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

RENCANA KERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROV. NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
1	2		3	4	5	
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33	
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	Jumlah trayek keperintisan Kapal	Trayek	7	
			Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Baru	Unit	0	
			Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Unit	3	
			Jumlah Paket Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Unit	1	
			Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kegiatan	2	
		2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat	
a	Jumlah Rambu Lalu Lintas				Unit	321
b	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell				Unit	489
c	Jumlah Guardrail Type II				Unit	803
d	Jumlah Terminal End Lengkung				Unit	60
d	Jumlah RPPJ				Unit	31
e	Jumlah Pembangunan Terminal Penumpang ALBN				Paket	1
f	Jumlah Pembangunan Terminal Barang Internasional			Paket	3	
Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara					
	a			Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	10
	b			Jumlah APILL	Unit	0
	c			Jumlah Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Unit	23
	Jumlah Monitoring dan evaluasi Prasarana LLAJSDP			Laporan	3	
Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	Jumlah Paket ATCS			Kota	1	

3	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab / Kota	4
			Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	0
			Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	75
			Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	75
			Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	75
4	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Laporan	3
			Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	
		a Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan		Dokumen	2
		Jumlah Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan		Laporan	0
		Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Kegiatan	1	
5	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	28
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	0
			Tingkat penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	%	95
			Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	Bulan	12
			Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	14

Kupang, Januari 2019
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wil. XIII Provinsi NTT



SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	9
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	1197
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	461
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	399
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit	21
		e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	1
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23
8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13		

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3
		10. Jumlah Momitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	1838
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	28
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRLI	Lokasi	3
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

Kupang, Desember 2019
Pihak Pertama.



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

LAMPIRAN II

RENCANA AKSI

TAHUN 2019

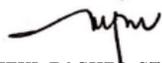
RENCANA AKSI TAHUN 2019
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggung jawab	
							T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33	Subsidi Operasional Bus Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi Transportasi Jalan	
		Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi darat	Jumlah trayek keperintisan Kapal	Trayek	7	Pengawasan Subsidi Kapal Perintis Perintis Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP	
			Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Baru	Unit	0	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Bar						
			Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Unit	3	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan		√	√	√	Seksi Sarana Prasarana SDP	
			Jumlah Paket Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan		√	√	√	Seksi Sarana Prasarana SDP	
			Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kegiatan	2	Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP & Seksi Sarana Prasarana SDP	
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi darat	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat									
			a	Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	321	Pengadaan dan Pemasangan		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			b	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	489	Pengadaan dan Pemasangan		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			c	Jumlah Guardrail Type II	Unit	803	Pengadaan dan Pemasangan		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			d	Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	60	Pengadaan dan Pemasangan		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			d	Jumlah RPPJ	Unit	31	Pengadaan dan Pemasangan		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			e	Jumlah Pembangunan Terminal Penumpang ALBN	Paket	1	Pembangunan Terminal Penumpang ALBN		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
			f	Jumlah Pembangunan Terminal Barang Internasional	Paket	3	Pembangunan Terminal Barang Internasional		√	√	√	Seksi Transportasi Jalan

		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara									
			a Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	10	Pemeliharaan		√	√	√		Seksi Transportasi Jalan
			b Jumlah APILL	Unit	0	Pemeliharaan		√	√	√		Seksi Transportasi Jalan
			c Jumlah Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Unit	23	Pemeliharaan		√	√	√		Seksi Transportasi Jalan
			Jumlah Monitoring dan evaluasi Prasarana LLAJSDP	Laporan	3		√	√	√	√		Seksi Transportasi Jalan, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP & Seksi Sarana Prasarana SDP
		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	Jumlah Paket ATCS	Kota	1			√	√	√		Seksi Transportasi Jalan
3	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab / Kota	4	melaksanakan kalibrasi alat uji	√	√	√	√		Seksi Transportasi Jalan
			Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	0							
			Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	75	standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	√	√	√	√		Seksi Sarana Prasarana SDP
			Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	75	kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	√	√	√	√		Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP
			Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	75	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	√	√	√	√		Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP

4	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Laporan	3	Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	√	√	√	√	Seksi Transportasi Jalan, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP & Seksi Sarana Prasarana SDP	
		Terwujudnya Keselamatan Transportasi	Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat									
		a	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	2			√	√	√	√	Seksi Sarana Prasarana SDP
			Jumlah Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan	Laporan	0							
		Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Kegiatan	1	Pembinaan dan Keselamatan	√	√	√	√	Seksi Transportasi Jalan		
5	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi darat	Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	28	Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	√	√	√	√	Kasubag Tata Usaha	
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	0							
			Tingkat penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	%	95	penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	√	√	√	√	Kasubag Tata Usaha	
			Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	Bulan	12	administrasi dan layanan perkantoran	√	√	√	√	Kasubag Tata Usaha	
			Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	14	belanja pegawai termasuk tunjangan	√	√	√	√	Kasubag Tata Usaha	

Kupang, Januari 2019
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wil. XIII Provinsi NTT


SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PJ
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33	1. Subsidi Operasional Bus Perintis 33 Trayek 2. Pengawasan Subsidi Operasional Bus Perintis	√	√	√	√	Seksi TJ
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	24	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Lintas Angkutan Penyeberangan di Wilayah BPTD XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi LLASDP
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7	1. Subsidi Operasional 3 Kapal Perintis 2. Pengawasan Subsidi Operasional Kapal Perintis	√	√	√	√	Seksi LLASDP
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat			Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan pada 12 Ruas Jalan Nasional di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi Transportasi Jalan
		a. Jumlah Delineator	Unit	1214		√	√	√	√	Seksi TJ
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	342		√	√	√	√	Seksi TJ
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	400		√	√	√	√	Seksi TJ
		d. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751		√	√	√	√	Seksi TJ
		e. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56		√	√	√	√	Seksi TJ

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PJ
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		f. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1	Pemeliharaan Jalan Nasional di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi TJ
		g. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1	DED UPPKB Nun Baun Sabu	√	√	√	√	Seksi TJ
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan	Lokasi	3	Pengawasan Terhadap UPPKB Nun Baun Sabu, UPPKB Oesapa, UPPKB Ngoorang dan UPPKB Watualo	√	√	√	√	Seksi TJ
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Sarsana dan Prasarana Bidang SDP	√	√	√	√	Seksi Sarpras SDP
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Transportasi Jalan	√	√	√	√	Seksi TJ
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Lalu Lintas dan Angkutan SDP Perintis Maupun Komersial	√	√	√	√	Seksi Lalin SDP
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Kontingensi dan Tanggap Darurat di Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Subbag TU
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pekerjaan Kontraktual baik di seksi Transportasi Jalan, Seksi Sarana Prasarana SDP dan Seksi Lalu Lintas SDP di BPTD XIII NTT	√	√	√	√	Subbag TU
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Angkutan Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Subbag TU

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PJ
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1	Pengadaan dan Pemasangan ATCS Lanjuta Kota Kupang	√	√	√	√	Seksi TJ
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	1838	Melakukan Pengawasan dan Pelaporan Terhadap Jumlah Trip Yang Terlayani Baik Komersial Maupun Perintis	√	√	√	√	Seksi Lalin SDP
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100	Melakukan pengawasan SPM terhadap kapal – kapal yang melayani lintasan penyeberangan perintis maupun komersial di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi Sarpras SDP
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100	1. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 2. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Seksi Sarpras SDP Seksi Lalin SDP
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9	Melaksanakan Pengeujiam Alat Kalibrasi di (Kabupaten/Kota Yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Seksi TJ
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37	Pengawasan Terhadap Keterampilan atau Serifikat Keahlian Yang dimiliki ASN	√	√	√	√	Subbag TU
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1	Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Motivasi (Family Gathering) Bagi Pegawai di BPTD Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Subbag TU
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	28	1. Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi 2. Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	√	√	√	√	Subbag TU

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PJ
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3	1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Naikliu Tahap II 2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Bakalang Tahap II 3. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Rajjua Tahap III	✓	✓	✓	✓	Seksi Srpras SDP
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1	Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Tahap III	✓	✓	✓	✓	Seksi Sarpras SDP
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4	1. Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain Tahap NTT Tahap I 2. Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap I 3. Pembangunan Terminal Barang Wini NTT Tahap I 4. Pembangunan Terminal Tipe Kota Kuoang Tahap II	✓	✓	✓	✓	Seksi TJ
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi	3	Melakukan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	✓	✓	✓	✓	Seksi TJ
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8	Monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja BPTD	✓	✓	✓	✓	Subbag TU
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran BPTD	✓	✓	✓	✓	Subbag TU
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091	Rekon SAI	✓	✓	✓	✓	Subbag TU
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12	1. Penyusunan Laptah, LKIP dan Penilaian Kinerja 2. Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Rapat Teknis /Koordinasi/Konsolidasi	✓	✓	✓	✓	Subbag TU

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PJ
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					4. Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bagi PNS Di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	Subbag TU

Kupang, Desember 2019
Pihak Pertama,



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

LAMPIRAN III

PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2019



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUL BACHRI, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSi**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSi
NRP. 6205 0784

Jakarta, 07 Januari 2019

Pihak Pertama,

SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
			Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah trayek keperintisan Kapal	Trayek
		3. Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Baru		Unit	0
		4. Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan		Unit	3
		5. Jumlah Paket Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan		Unit	1
		6. Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kegiatan	2	
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	7. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	321
			b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	489
			c. Jumlah Guardrail Type II	Unit	803
			d. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	60

			e. Jumlah RPPJ	Unit	31
			f. Jumlah Pembangunan Terminal Penumpang ALBN	Paket	1
			g. Jumlah Pembangunan Terminal Barang Internasional	Paket	3
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	8. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara		
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	10
			b. Jumlah APILL	Unit	-
			c. Jumlah Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Unit	23
			9. Jumlah Monitoring dan evaluasi Prasarana LLAJSDP	Laporan	3
		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat	10. Jumlah Paket ATCS	Kota	1
3.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	11. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji	Kab/Kota	4
			12. Prosentase Sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	-
			13. Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	75
			14. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	75

			15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	75
4.	Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat	Tersusunnya Kebijakan Keselamatan Transportasi Darat	16. Jumlah Monitoring Keselamatan Transportasi Darat	Laporan	3
		Terwujudnya Keselamatan Transportasi	17. Jumlah Materi Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat a. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	2
			18. Jumlah Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan	Laporan	-
			19. Jumlah Dukungan Bidang Pembinaan dan Keselamatan	Kegiatan	1
5	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	20. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	28
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	21. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	0
			22. Tingkat penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	%	95
			23. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	Bulan	12
			24. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	14

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	82.215.000.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	30.400.000.000
3	Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	1.390.647.000
4	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	27.091.351.000
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	15.795.604.000

Pihak Kedua,



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, 07 Januari 2019
Pihak Pertama,



SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NANANG RAHARDJO, SH, MH**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SAIFUL BACHRI, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019

Pihak Pertama,

NANANG RAHARDJO, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700206 200312 1 001

- 4 -

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	1. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	40
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan transportasi	2. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	-
			3. Tingkat penyerapan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi NTT	%	95
			4. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran	Bulan	12
			5. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan	Bulan	14

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	15.795.604.000

Pihak Kedua,



SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019

Pihak Pertama,



NANANG RAHARDJO, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700206 200312 1 001



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUJUR PANJAITAN, SE, MM.Tr**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SAIFUL BACHRI, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019
Pihak Pertama,

JUJUR PANJAITAN, SE, MM.Tr
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760103 199803 1 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI TRANSPORTASI JALAN UNIT KERJA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Jalan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
2	Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	2. Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	321
			b. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Solar Cell	Unit	489
			c. Jumlah Guardrail Type II	Unit	803
			d. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	60
			e. Jumlah RPPJ	Unit	31
			f. Pembangunan Terminal Penumpang ALBN	Paket	1
		g. Pembangunan Terminal Barang Internasional	Paket	3	
		Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	3. Jumlah paket Fasilitas perlengkapan jalan yang terpeliharaan		
a. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	10			
b. Jumlah APILL	Unit	-			
c. Jumlah Penerangan					

		Jalan Umum (LPJU)	Unit	23
		d. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	M'	-
		4. Jumlah Monitoring dan evaluasi Prasarana LLAJ	Laporan	1
		5. Pengadaan dan Pemasangan ATCS Lanjutan	Paket	1

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	26.150.000.000
2.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional	500.000.000
2	Pengadaan dan Pemasangan ATCS	2.500.000.000
3	Subsidi Trayek Perintis Angkutan Jalan	6.376.956.000
4.	Pembangunan Terminal Penumpang ALBN Kota Kupang, NTT Tahap II (termasuk supervisi)	12.500.000.000
5.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap I (termasuk supervisi)	13.000.000.000
6.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap I (termasuk supervisi)	7.500.000.000
7.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap I (termasuk supervisi)	10.000.000.000
8.	Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	1.390.647.000
9.	Operasional Terminal ALBN Kefamenanu	598.828.000
10.	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan	200.000.000

Pihak Kedua,



SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019
Pihak Pertama,



JUJUR PANJAITAN, SE, MM.T
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760103 199803 1 001



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUSA E. THONAK**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SAIFUL BACHRI, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019
Pihak Pertama,

MUSA E. THONAK
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19670513 199303 1 003

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	1. Jumlah trayek keperintisan Kapal	Trayek	7
			2. Monitoring dan Evaluasi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kegiatan	2
2.	Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan	Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi	3. Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	75
			4. Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	75

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Subsidi Perintis Angkutan Penyeberangan	19.865.567.000
2.	Pengawasan Subsidi Perintis Kapal Penyeberangan	250.000.000
3.	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	150.000.000

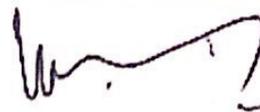
Pihak Kedua,



SAIFUL BACHRI, ST, MT
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19730714 199803 1 001

Kupang, Januari 2019

Pihak Pertama,



MUSA E. THONAK
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19670513 199303 1 003



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SAIFUL BACHRI, ST. MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SAIFUL BACHRI, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701124 199403 1 006

Kupang, Januari 2019
Pihak Pertama,

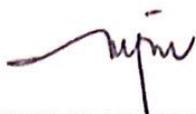
SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19690529 2000003 1 002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat	Terwujudnya peningkatan kapasitas transportasi	1. Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Baru	Unit	0
			2. Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Unit	3
			3. Jumlah Paket Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	Unit	1

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu Tahap II (termasuk supervisi)	20.000.000.000
2.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang Tahap II (termasuk supervisi)	13.500.000.000
3.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua Tahap III di Pulau Raijua (termasuk supervisi) (selesai)	4.000.000.000
4.	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Tahap III (termasuk supervisi)	1.715.000.000
5.	Pembangunan dan pemasangan 1 unit SBNP Darat di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (QW)	500.000.000
6.	Pembangunan dan pemasangan 2 (dua) unit SBNP Laut di Pelabuhan Penyeberangan Pamana	750.000.000
7.	Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana SDP	215.200.000

Pihak Kedua,



SAIFUL BACHRI, ST, MT

Pembina Tk (IV/b)
NIP. 19701124 199403 1 006

Kupang, Januari 2019

Pihak Pertama,



SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc

Pembina (IV/a)
NIP. 19690529 2000003 1 002

LAMPIRAN IV

REVISI PENILAIAN

KINERJA

TAHUN 2019



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS**

Jabatan : **KEPALA BALAI KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSi**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, MSi
NRP. 6205 0784

Jakarta, Desember 2019
Pihak Pertama,

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	9
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	1197
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	461
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	399
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit	21
		e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	1
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	1838
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9
4.	Meningkatnya Kualitas Dan	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Kinerja ASN BPTD	18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	28
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi	3
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	22.072.961.000
2.	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	1.911.360.000
3.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Jalan	48.984.224.000
4.	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	34.410.526.000
5.	Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	424.295.000
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	17.038.861.000
7.	Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	26.137.548.000

Pihak Kedua,



Drs. BUDLSETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama.



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IRPAN, ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TITO GESIT UTIARTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kupang, Desember 2019
Pihak Pertama,

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

MUHAMMAD IRPAN, ST
Penata (III/c)
NIP. 19800710 200912 1 004

REVISI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019
SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	0
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	0
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	0
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	0
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	0
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	0
		d. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	0
		e. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	0
		f. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	0
		g. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	0
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	0
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	0
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	3
		10. Jumlah Momitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	4
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	0
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	0
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	0
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	0
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	0
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	37
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	37
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	0
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi	0
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	83,8
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	99,17
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	826.120.188.091
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	12
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	12

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	344.135.000
2.	Peningkatan Motivasi BPTD Wilayah XII NTT	219.997.000
3.	Penyusunan Laptah, LKIP dan Penilaian Kinerja	101.210.000
4.	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran	349.989.000
5.	Rapat Teknis /Koordinasi/Konsolidasi	652.727.000
6.	Monitoring Pengawasan Penyelenggaraan Angkiuta Lebaran, Natal dan Tahun Baru	369.031.000
7.	Monitoring Pengawasan Pembangunan dan Pengeloan Perhubungan Darat	228.166.000
8.	Kontingensi Bencana Tanggap Darurat	70.570.000
9.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.625.485.000
10.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.403.472.000

Pihak Kedua,



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Januari 2019

Pihak Pertama,



MUHAMMAD IRPAN, ST

Penata (III/c)

NIP. 19800710 200912 1 004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EDWIN FAUZI, S.SiT**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Desember 2019

Pihak Pertama,

EDWIN FAUZI, S.SiT

Penata (III/c)

NIP. 19841013 200912 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI TRANSPORTASI JALAN UNIT KERJA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	33
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	0
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	0
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	1197
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	461
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	399
		d. Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan	Unit	21
		e. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	751
		f. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	56
		g. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	1
		h. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasionalkan	Lokasi	1
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	23
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	0
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	0
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	0
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	1
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	0
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	0
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	0
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	9
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	0
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	0
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	0
5.	Meningkatnya	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0
		22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	4
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi	3
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	0
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	0
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	0
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	0
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	445.530.000
2.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	21.627.431.000
2	Pengadaan dan Pemasangan ATCS Prioritas Nasional	1.911.360.000
3	Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Jalan	6.339.066.000
4.	Pembangunan Terminal Tipe A Kota Kupang, NTT (termasuk supervisi)	10.540.452.000
5.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap I (termasuk supervisi)	14.246.662.000
6.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Motamasin NTT Tahap I (termasuk supervisi)	7.222.533.000
7.	Pembangunan Terminal Barang Internasional Wini NTT Tahap I (termasuk supervisi)	14.594.300.000
8.	Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor	1.365.327.000
9.	Penysunan Dokumen DED UPPKB	500.000.000
10.	Layanan Internal Overhead	80.000.000
11.	Layanan Pengelolaan Jembatan timbang	386.295.000
11.	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan	269.765.000
12.	Operasional Terminal Tipe A	157.047.000

Pihak Kedua,



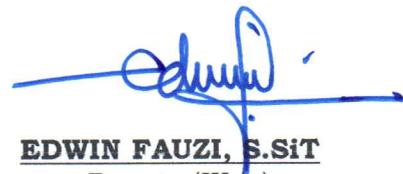
TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Desember 2019

Pihak Pertama,



EDWIN FAUZI, S.SiT

Penata (III/c)

NIP. 19841013 200912 1 003



REVISI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MUSA E. THONAK**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Desember 2019

Pihak Pertama,

MUSA E. THONAK

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19670513 199303 1 003

REVISI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	0
		2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	9
		3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	7
2.	Terwujudnya Keselamatan Berjalan Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
		a. Jumlah Delineator	Unit	0
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	0
		c. Jumlah Alat Penerangan Jalan	Unit	0
		d. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	Unit	0
		e. Jumlah Terminal End Lengkung	Unit	0
		f. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	Kegiatan	0
		g. Jumlah Rehabilitasi UPPKB	Lokasi	0
		5. Jumlah UPPKB yang dioperasikan	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	0
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	13
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	0
		10. Jumlah Momitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	0
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	0
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	0
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	100
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	0
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	0
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	0
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	0
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	0

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
	Transportasi Darat	22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	0
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRL	Lokasi	0
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	0
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	0
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	0
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	0
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Subsidi Perintis Angkutan Penyeberangan	19.391.435.000
2.	Pengawasan Subsidi Perintis Kapal Penyeberangan	250.000.000
3.	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	175.000.000

Pihak Kedua,



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS

Pembina Tk. 1(IV/b)

NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Desember 2019

Pihak Pertama,



MUSA E. THONAR

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19670513 199303 1 003



REVISI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kupang, Desember 2019
Pihak Pertama,

TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19690529 2000003 1 002

REVISI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1. Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	0
2. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil		Lintas	0	
3. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis		Lintas	0	
2.	Terwujudnya Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan, sungai, danau dan Penyeberangan	4. Jumlah Sarana Dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat		
a. Jumlah Delineator		Unit	0	
b. Jumlah Rambu Lalu Lintas		Unit	0	
c. Jumlah Alat Penerangan Jalan		Unit	0	
d. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)		Unit	0	
e. Jumlah Terminal End Lengkung		Unit	0	
f. Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara		Kegiatan	0	
g. Jumlah Rehabilitasi UPPKB		Lokasi	0	
5. Jumlah UPPKB yang dioperasikan		Lokasi	0	

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		6. Jumlah Monitoring Dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Kegiatan	16
		7. Jumlah Monitoring dan Pengawasan LLAJ	Kegiatan	0
		8. Jumlah Monitoring dan Pengawasan SDP	Kegiatan	0
		9. Jumlah Kontingensi Bencana Dan Tanggap Darurat	Kegiatan	0
		10. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	Kegiatan	0
		11. Terlaksananya monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	0
		12. Jumlah ATCS Lanjutan	Kota	0
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	13. Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	Trip	0
		14. Prosentase Kapal Penyeberangan Pada Lintas Utama Yang Memenuhi SPM	%	100
		15. Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	0
		16. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan	Kab/Kota	0
4.	Meningkatnya Kualitas Dan Kinerja ASN BPTD	17. Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	0
		18. Terlaksananya peningkatan motivasi pegawai BPTD Wil XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	Kegiatan	0
		19. Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi BPTD	Kegiatan	0
5.	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana	20. Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	3
		21. Jumlah Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	1

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	Transportasi Darat	22. Jumlah Pembangunan Terminal	Lokasi	0
6.	Meningkatnya Aplikasi Skema Manajemen Transportasi Perkotaan	23. Jumlah Penerapan MRLL	Lokasi	0
7.	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di BPTD	24. Nilai AKIP	Nilai	0
		25. Tingkat Penyerapan Anggaran	%	0
		26. Nilai Aset yang diinventarisasi	Rp.	0
		27. Penyelenggaraan Administrasi Dan Layanan Perkantoran	Bulan	0
		28. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan	Bulan	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Naikliu Tahap II (termasuk supervisi)	17.540.805.000
2.	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang Tahap II (termasuk supervisi)	10.595.198.000
3.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Raijua Tahap III di Pulau Raijua (termasuk supervisi)(selesai)	3.922.708.000
4.	Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Tahap III (termasuk supervisi)	1.700.804.000
5.	Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana SDP	229.314.000

Pihak Kedua,



TITO GESIT UTIARTO, SE., DESS
Pembina Tk. 1(IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

Kupang, Desember 2019

Pihak Pertama,



SHAIFUL JIHAD, ST, M.Eng, M.Sc
Pembina (IV/a)
NIP. 19690529 2000003 1 002



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. W. MONGINSIDI I, KELAPA LIMA, KOTA LAMA,
KOTA KUPANG - NTT (0380) 8443088

Email: bptd13.ntt@gmail.com